

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Bagian selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi ekonomi di wilayah tertentu yang berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah juga merupakan indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi tolok ukur perkembangan perekonomian suatu negara dengan melihat kemampuan dalam meningkatkan hasil barang serta jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menjadi gambaran perkembangan suatu perekonomian dalam tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya (Sukirno, 2021).

Menurut Prof. Simon Kuznet (1871), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan Negara menyediakan jenis barang yang semakin beragam kepada penduduk. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh

adanya kemajuan atau penyesuaian-penesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Sabardin & Muhammad Ghafur Wibowo, 2024).

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan mengukur tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu, yang mencerminkan kapasitas wilayah tersebut dalam mengelola sumber dayanya secara efektif (Nabila et al., 2024).

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, secara umum teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Douglass C. North

Douglass C. North (1990), seorang ekonom institusional terkemuka, mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor produksi fisik seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, tetapi juga oleh peran kelembagaan dan struktur insentif yang membentuk perilaku ekonomi (North, 1990).

Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi institusional yang dikembangkan North, institusi yang mencakup aturan formal (seperti hukum, peraturan, kebijakan upah minimum) dan informal (seperti norma sosial dan politik) berfungsi untuk menciptakan struktur insentif yang dapat mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi produktif (Acemoglu et al., 2019).

North menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila institusi yang ada mampu mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran ekonomi, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendukung penyelepasan antara kepentingan individu dan sosial (North, 1990). Dalam konteks ini, demokrasi sebagai bentuk institusi politik memainkan peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum, transparansi, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Acemoglu et al., 2019).

b. Teori Adam Smith

Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Jumlah penduduk akan meningkat jika upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup (Prastiwi et al., 2025) .

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal dan laju pertumbuhan output).

Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, dimana dia menyatakan bahwa empat faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan, dan akhirnya jumlah utang (Prastiwi et al., 2025).

c. Teori Solow-Swan

Pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini didasarkan kepada anggapan teori klasik dimana diasumsikan bahwa perekonomian akan tetap mengalami keadaan *full employment* dan peralatan modal akan tetap digunakan sepanjang waktu (Amanda, 2024).

Dalam model neoklasik ini rasio modal output (*capital output ratio*) dapat berubah. Dalam artian apabila lebih banyak modal yang digunakan maka jumlah tenaga kerja yang digunakan sedikit, begitupun sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) terbatas akan digunakan untuk menghasilkan output tertentu (Amanda, 2024).

Menurut teori solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan investasi dalam bentuk barang modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi juga dapat membuat

pendapat tenaga kerja per orang dan memberikan inovasi pada perusahaan yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi (Martadinata, 2022).

d. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini dipelopori oleh Paul Romer (1986) dan Robert Lucas romer (1988) teori tersebut menekankan faktor internal dalam ekonomi, seperti kebijakan pemerintah, inovasi, dan peningkatan modal manusia, sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut berasumsi bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti investasi asing atau perdagangan internasional, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Dimana faktor Kesetaraan gender dan upah yang layak dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Wijayanto, 2019).

Pertumbuhan ekonomi endogen (*endogenous economic growth*) adalah model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara. Model ini mengutamakan sumber daya manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset teknologi, dan kelembagaan. Paul Romer menyebutkan tiga faktor dasar dalam pertumbuhan endogen yaitu: teknologi yang bersifat endogen melalui proses ilmu pengetahuan, ide-ide atau inovasi baru, serta produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi. Teori ini dinyatakan dengan persamaan $Y = AK$, dimana (Y) merupakan pertumbuhan ekonomi, (A) teknologi, dan (K) merupakan modal fisik dan sumber daya manusia (Shaedji, 2023).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.2.1 Definisi Produk Regional Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB juga untuk memprediksi tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah tertentu serta sebagai parameter yang selalu digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan daerah dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penilaian dari seluruh jasa dan barang diproduksi di satu wilayah tanpa membandingkan permasalahan produksi biasanya dalam waktu produksi satu tahun.

2.1.2.2 Pendekatan dalam Menghitung PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB yaitu penjumlahan kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak kurang subsidi atas produksi dan impor.

Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkaitan dengan hal tersebut, perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi dalam satu tahun. Cara ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \{(P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + \dots + (P_n \times Q_n)\}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

P_1 = Harga Barang ke-1

P_2 = Harga Barang ke-2

P_n = Harga Barang ke-n

Q_1 = Jenis Barang ke-1

Q_2 = Jenis Barang ke-2

Q_n = Jenis Barang ke-n

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun). Yang dimaksud dari balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Keseluruhannya sebelum dipotong pajak penghasilan maupun langsung yang lain. Dalam hal ini PDRB juga memuat pajak penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan yaitu:

$$Y = Y_W + Y_I + Y_R + Y_P$$

Keterangan:

W = Upah

I = Bunga

R = Sewa

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Lembaga non profit, rumah tangga atau LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan investor dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Cara perhitungan pendapatan menurut pendekatan pengeluaran adalah dengan menunjukkan semua pengeluaran.

Rumus perhitungan PDRB menurut pendekatan pengeluaran:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

C = Pengeluaran konsumsi

I = Pengeluaran produsen atau *income*

G = Pengeluaran pemerintah

X-M = Pengeluaran luar negeri/neto ekspor (ekspor-impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun.

2.1.2.3 Manfaat atau kegunaan PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari data antara lain:

- 1) PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu sebaliknya.
- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- 3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- 5) PDRB perkapita atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2.1.3 Indeks Demokrasi Indonesia

2.1.3.1 Definisi Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah berdasarkan data yang bersumber dari fakta-fakta empirik di lapangan, termasuk

laporan media massa, dokumentasi instansi pemerintah, maupun hasil observasi langsung. IDI dikembangkan sejak 2007 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas sebagai bentuk implementasi agenda reformasi dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan demokrasi lokal (Kesbangpol Sulbar, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik, (2021), IDI mengukur capaian demokrasi dalam tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiga aspek ini merupakan fondasi sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Indeks ini bertujuan tidak hanya untuk memantau sejauh mana nilai-nilai demokrasi diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan institusi pemerintah, tetapi juga sebagai rujukan kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program pembangunan politik yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Pengukuran IDI bersifat kuantitatif dan menggunakan skala 0 sampai 100. Nilai di atas 80 dikategorikan sebagai demokratis (baik), 60–80 sebagai sedang, dan di bawah 60 sebagai kurang demokratis. Pengumpulan data dilakukan setiap tahun oleh Tim Teknis IDI provinsi dan diverifikasi oleh Tim Nasional yang terdiri dari para akademisi dan praktisi politik (Bappenas, 2023).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, IDI mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik dalam proses politik yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, efektivitas kebijakan publik, dan iklim investasi. Oleh karena itu, IDI menjadi variabel penting dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi regional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan hasil kerja sama usaha oleh beberapa Instansi, yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); dan Tim Ahli.

Untuk mengukur sistem demokrasi yang kompleks diperlukan metode yang tepat, salah satu metode dalam mengukurnya adalah dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia. Menurut indeks demokrasi yang diinisiasi oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi tidak dapat terukur jika hanya dilihat dari faktor kebebasan sipil atau politik saja, dikarenakan komponen tersebut tidak cukup “kuat” dalam mengidentifikasi kondisi demokrasi di suatu negara (Shaedji, 2023).

2.1.3.2 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komprehensif yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI dibangun berdasarkan 3 aspek utama, 11 variabel, dan 28 indikator yang mengadopsi konsep demokrasi holistik dengan mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan istilah ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Ketiga aspek IDI kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi secara komprehensif mencakup dimensi ipoleksosbudhankam, dimana aspek kebebasan sipil meliputi dimensi ideologi,

sosial, dan budaya; aspek hak-hak politik mencakup dimensi politik; sementara aspek kapasitas lembaga demokrasi mengintegrasikan dimensi ekonomi, pertahanan, dan keamanan melalui peran lembaga-lembaga negara dalam menjamin stabilitas dan ketertiban.

Dalam konteks teori North (1990) tentang institusi dan pembangunan ekonomi, IDI menjadi proksi yang tepat untuk mengukur kualitas institusi formal dan informal yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dimensi ipoleksosbudhankam dalam IDI mencerminkan kekuatan institusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Aspek ideologi dan politik menunjukkan stabilitas sistem pemerintahan dan kepastian hukum, aspek ekonomi mencerminkan kebebasan berusaha dan perlindungan hak properti, aspek sosial dan budaya menggambarkan modal sosial dan kohesi masyarakat, sementara aspek pertahanan dan keamanan mencerminkan stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat investasi dan aktivitas ekonomi. Keseluruhan dimensi ini bekerja secara sinergis dalam membentuk iklim institusional yang mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Indikator-indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam. Aspek, variabel dan indikator tersebut adalah:

1) Aspek Kebebasan Sipil

Menilai sejauh mana masyarakat bebas mengekspresikan diri, berorganisasi, dan menjalankan kepercayaan. Terdiri dari 4 variabel dan 10 indikator mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragama dapat mandiri, otonom,

sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebebasan berkumpul dan berserikat
 1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
 2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- b. Kebebasan berpendapat
 1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.
 2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
- c. Kebebasan Berkeyakinan
 1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
 2. Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya.
 3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
- d. Kebebasan dari Diskriminasi
 1. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

2. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

2) Aspek Hak-Hak Politik

Terdiri dari 2 variabel dan 7 indikator aspek hak-hak politik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak memilih dan dipilih
 1. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat.
 2. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.
 3. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT).
 4. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout).
 5. Persentase anggota perempuan DPRD provinsi.
- b. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan
 1. Demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan.
 2. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Terdiri 5 variabel dan 11 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan yaitu:

- a. Pemilu yang bebas dan adil
 1. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.
 2. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.
- b. Peran DPRD
 1. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD.
 2. Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
 3. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
- c. Peran Partai Politik
 1. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.
 2. Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
- d. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
 1. Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh putusan PTUN.
 2. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

e. Peradilan yang independen

1. Keputusan hakim yang kontroversial.
2. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Dengan indikator-indikator ini, IDI memberikan gambaran holistik tentang keadaan demokrasi yang tidak hanya mencerminkan kondisi politik, tetapi juga sosial, ideologis, ekonomi, serta stabilitas keamanan, sesuai dengan pendekatan ipoleksosbudhankam.

2.1.3.4 Teori Demokrasi

a. Teori Robert A. Dahl

Teori Teori Demokrasi Menurut Robert A. Dahl (1971), demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi efektif, persamaan hak pilih, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa. Menurut Dahl yang dirangkum dalam United Nations Development Programme (2012) menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk:

- 1) Membentuk dan ikut serta dalam organisasi,
- 2) Berekspresi atau berpendapat,
- 3) Menjadi pejabat publik,
- 4) Melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting,
- 5) Memberikan suara dalam pemilihan umum,
- 6) Ada pemilihan umum yang jujur dan adil,

- 7) Adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah,
- 8) Adanya jaminan kelembagaan, bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut.

b. Teori Douglass C. North (1990)

Menurut Douglass C. North (1990), institusi didefinisikan sebagai "aturan main" dalam masyarakat, baik yang formal seperti hukum dan konstitusi, maupun informal seperti norma sosial dan nilai budaya. Demokrasi sebagai institusi politik memungkinkan terbentuknya kepastian hukum, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap kekuasaan, yang semuanya mendorong efisiensi pasar dan investasi jangka panjang. Demokrasi juga memperbesar ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, yang pada gilirannya menciptakan legitimasi dan stabilitas sosial (Eri et al., 2022).

c. Teori Acemoglu dan Robinson

Acemoglu dan Robinson (2012) dalam bukunya *Why Nations Fail* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui institusi inklusif, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik. Demokrasi mendorong terbentuknya institusi inklusif melalui pemilu yang bebas, kebebasan sipil, dan perlindungan terhadap hak milik. Sebaliknya, institusi eksklusif yang

menguntungkan kelompok elite tertentu cenderung memicu konflik, ketimpangan, dan stagnasi ekonomi.

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 1999, mendefinisikan upah minimum sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap” Sebagai imbalannya, para pekerja harus mendapatkan upah dari perusahaan dalam bentuk tunai yang harus ditetapkan atas dasar perundangan-undangan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Menurut Nurtiyas (2016) dalam penelitian Zahrina (2023) ada dua unsur penting dari upah minimum, sebagai berikut:

1. Upah permulaan ialah para pekerja buruh yang mendapatkan upah terendah yang diberikan pada waktu pertama kali dia diterima bekerja dan harus diterima.
2. Para pekerja buruh secara minimal harus mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga yang didapatkan dari jumlah upah minimum tersebut.

Pengertian menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri Upah minimum merupakan upah terendah yang diberikan perusahaan kepada para pekerja dalam bentuk tunai termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk dengan upah lembur. Upah Minimum Provinsi (UMP) upah yang ditetapkan oleh gubernur yang berlaku

untuk seluruh para pekerja kabupaten/kota di satu provinsi, serta dipertimbangkan oleh pengusaha, pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja dan UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) upah yang diberikan kepada para pekerja dari perusahaan yang berlaku untuk para pekerja di daerah kabupaten/kota, penetapan UMK ini selambat-lambatnya yaitu 40 hari atau sesudah penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota ini harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

Menurut Sari (2013) dalam penelitian Zahrina (2023) adanya tujuan penetapan upah minimum adalah tujuan utamanya jaringan pengaman, yang dimana mempunyai fungsi untuk mencegah upah tidak menurun ke bawah daya beli pekerja. Oleh karena itu, standar tingkat kebutuhan para pekerja harus dapat dipenuhi dengan mendukung daya beli pekerja, dan penetapan upah di perusahaan sering digunakan sebagai upah standar para pekerja. Salah satu yang dapat mengurangi konsekuensi pengangguran yaitu upah minimum yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, hal ini diperkirakan oleh teori ekonomi konvensional.

2.1.5 Tenaga Kerja

2.1.5.1 Definisi Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 (2) tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu untuk melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika terdapat permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik dan berdasarkan *International Labor Organization* (ILO) yang menjadi penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang kemudian dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah faktor penggerak paling penting dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akhir. Setiap kegiatan produksi diperlukan jumlah tenaga kerja yang memadai dan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan (Islamiatus Izzah & Martha Hendarti, 2021).

2.1.5.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut Sadikin & Turnadi (2022), tenaga kerja diklasifikasikan kedalam tiga jenis, diantaranya yaitu:

- 1) Berdasarkan penduduknya
 - a. Tenaga kerja, merupakan bagian dari penduduk atau orang-orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yaitu penduduk yang sedang bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
 - b. Bukan tenaga kerja, adalah bagian dari penduduk yang tidak aktif berpartisipasi pada kegiatan ekonomi dimana merupakan penduduk yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan.

2) Berdasarkan batas kerja

- a. Angkatan kerja adalah penduduk merupakan penduduk berusia 15- 64 tahun yang merupakan penduduk dengan usia produktif yang sedang aktif bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
- b. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang bukan bagian dari angkatan kerja oleh karena itu penduduk bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang sedang tidak bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan.

3) Berdasarkan Kualitasnya

- a. Tenaga kerja terdidik, merupakan bagian dari tenaga kerja yang sudah menempuh pendidikan formal, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari lembaga pendidikan formal seperti melalui sekolah berupa universitas, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
- b. Tenaga kerja terlatih, merupakan angkatan kerja yang mempunyai kemampuan dalam suatu bidang, di mana kemampuan tersebut diperolehnya dari pengalaman bekerja. Contoh: profesi montir, apoteker, spesialis bedah, dan lain-lainnya.
- c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja dalam kategori tenaga kerja kasar, mereka yang di dalam bekerja hanya mengandalkan tenaga semata tanpa didukung kemampuan lainnya. Misalnya: profesi asisten rumah tangga, buruh, kuli, dan lain-lainnya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat asas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Penulis, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Adib et al., 2019)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, metode regresi data panel	Variabel tenaga kerja, tahun penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel indeks demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan, dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Ecosains Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
2.	Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah Dan Penanaman Modal Terhadap Pdrb Di Provinsi Bali (Luh et al., 2019)	Variabel tenaga kerja dan tingkat upah	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, metode regresi data panel	Variabel tenaga kerja dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Bali	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana
3.	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018) (Budihardjo et al., 2020)	Variabel tenaga kerja dan metode regresi data panel	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, UMP, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah	Diponegoro <i>Journal of Economics</i>
4.	Demokrasi Pincang: Analisis terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi (Fajri et al., 2021)	Variabel Indeks Demokrasi	Variabel UMP, tenaga kerja, lingkup objek penelitian, tahun penelitian, dan metode penelitian menggunakan regresi data panel	Rendahnya Demokrasi bukan saja diakibatkan adanya aturan tertulis (membatasi kebebasan) namun, dominasi eksekutif dan lemahnya peran legislatif	Jurnal El-Riyasah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Pulau Jawa (Sari, 2023)	Variabel tenaga kerja, lingkup objek penelitian, dan metode penelitian menggunakan regresi data panel	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, UMP, dan tahun penelitian	Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Pulau Jawa	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)
6.	Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia (Abdullah & Hasbiullah, 2023)	Variabel Upah Minimum Provinsi dan metode regresi data panel	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, tenaga kerja, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Indonesia	<i>Journal of Regional Economics</i>
7.	Analisis Investasi (PMDN), Tenaga Kerja, kerja UMP, IPM dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB 8 Kab/Kota Provinsi Banten 2015-2022 (Syaputra et al., 2024)	Variabel tenaga (PMDN), Tenaga Kerja, kerja UMP, IPM dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB 8 Kab/Kota Provinsi Banten 2015-2022 (Syaputra et al., 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, UMP, tahun penelitian, metode penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap PDRB di 8 Kab/Kota di Provinsi Banten	Jurnal Ekonomi Trisakti
8.	<i>Analysis of the Influence of Democracy Index, Human Development Index, Foreign Investment, Government Expenditure, and Labor On Indonesian Economic Growth</i> (Ivan Fadillah et al., 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia,dan tenaga kerja	Varibel UMP, metode penelitian regresi data panel, tahun penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	<i>International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)</i>
9.	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Binjai (Putri, 2023)	Variabel tenaga kerja	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, UMP, lingkup objek penelitian, metode regresi data panel, dan tahun penelitian	Variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Kota Binjai	Moneter: Jurnal Keuangan
10.	<i>Democracy, Human Development, Income Distribution and Regional Economic Performance: A Panel Data Analysis of 34 Provinces in Indonesia</i> (Sijabat, 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, metode regresi data panel	Variabel UMP, tenaga kerja, tahun penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB	JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Analisis Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran, dan Gini Ratio Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 2014-2022 (Hutasoit et al., 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia	Variabel UMP, tenaga kerja, metode regresi data panel, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.	Mantap: <i>Journal of Management Accounting, Tax and Production</i>
12.	Dampak Demografi, Indeks Pembangunan Manusia dan Demokrasi Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Provinsi Sulawesi Periode 2012-2022 (Ifan et al., 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia dan metode regresi data panel	Variabel UMP, tenaga kerja, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi	Ihtiyat: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah
13.	Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia (Sejati, 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia dan metode regresi data panel	Variabel UMP, tenaga kerja, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia	Repository Universitas Jambi
14.	Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks dan metode regresi Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Rabbani & Hasmarini, 2024)	Variabel Upah Minimum Provinsi dan metode regresi data panel	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia, tenaga kerja, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat	JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat
15.	Peran Demokrasi, Populasi, dan Indeks Pembangunan Manusia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (Saputra et al., 2024)	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia dan metode regresi data panel	Variabel UMP, tenaga kerja, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung	JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara
16	Determinants of Economic Growth in Java: Per Capita Expenditures, Population, and Contribution of Indonesian Democracy (Sari, 2025)	Variabel Indeks Demokrasi dan menggunakan metode analisis regresi data panel	Variabel UMP, tenaga kerja, tahun penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan hubungan positif tetapi secara statistik tidak signifikan	<i>JDESS: Journal of Development Economics and Social Stude</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	<i>The Effect of Provincial Minimum Wage, Investment, and Labor Force Participation Rate on Economics Growth in West Java 2015-2019</i> (M. D. Putri et al., 2023)	Variabel upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan metode regresi data panel	Variabel Indeks Indonesia, tahun penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel Upah Minimum Provinsi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat	<i>International Journal of Current Economics & Business Ventures</i>
18	<i>Democracy Does Cause Growth</i> (Acemoglu et al., 2019)	Variabel Demokrasi	Variabel UMP, tenaga kerja, lingkup objek penelitian dan tahun penelitian	Variabel demokrasi dapat menumbuhkan GDP per kapita sebesar 20% dalam jangka panjang	<i>Journal of Political Economy</i>
19	<i>The African tragedy: the effect of democracy on economic growth</i> (Khodaverdian, 2022)	Variabel Demokrasi	Variabel UMP, tenaga kerja, lingkup objek penelitian dan tahun penelitian	Variabel demokrasi tidak dapat meningkatkan pendapatan perkapita di negara-negara Afrika karena tidak mendukung transisi demografis.	<i>Empirical Economics</i>
20	<i>Effect of minimum wages on labor, welfare and economic growth: Evidence from East Java province</i> (Rizal & Mustapita, 2024)	Variabel Upah Minimum Provinsi Demokrasi Indonesia, tenaga kerja, metode penelitian analisis data panel, lingkup objek penelitian, dan tahun penelitian	Variabel Indeks Indonesia, tahun penelitian, dan lingkup objek penelitian	Variabel upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur	Optimus: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada maka garis besar penelitiannya ini yaitu melihat hubungan antara Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023.

2.2.1. Hubungan Indeks Demokrasi Indonesia terhadap PDRB

Menurut North (1990) dalam bukunya “*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*” pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti investasi asing atau perubahan pasar global, tetapi juga oleh faktor internal seperti inovasi, kebijakan publik, serta stabilitas politik dan sosial. Selain itu, teori ekonomi kelembagaan menegaskan bahwa kualitas institusi, termasuk institusi demokrasi, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas fiskal, dan penyediaan layanan publik yang efektif (Martha et al., 2015).

Menurut Tavares dan Wacziarg (2001) hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan berbagai argumen. Di mana, beberapa argumen menunjukkan bahwa demokrasi dan pertumbuhan memiliki hubungan positif, artinya semakin kuatnya sistem demokrasi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem demokrasi yaitu perlindungan akan hak milik diberi ruang terhadap individu maupun kelembagaan sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan, stabilitas politik dimana kenyataan dari rezim politik tercermin dari stabilitas pemerintahan. Sebab, stabilitas politik yang baik akan memberikan dampak yang menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan akumulasi sumber daya manusia merupakan saluran alternatif transmisi demokrasi menuju pertumbuhan, dan inovasi dari sistem teknologi (Ghardallou & Sridi, 2020).

Penelitian terdahulu oleh Acemoglu et al., (2019) menemukan bahwa demokrasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat perlindungan hak properti, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan

mengurangi korupsi. Penelitian lain oleh Hutasoit et al., (2024) menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Adib et al., (2019) bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Kemajuan ekonomi berjalan paralel dengan kemapanan sistem demokrasi negara bersangkutan. Namun, Indonesia dalam membangun sistem politik demokrasi justru melahirkan fenomena ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun ternyata belum membawa dampak signifikan pada kemajuan ekonomi.

2.2.2. Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap PDRB

Upah dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan pengusaha kepada pekerja. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi perusahaan tinggi. Upah minimum merupakan upah tetap yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum, sehingga meningkatkan tingkat penghasilan pekerja yang rendah (Syafira & Selvia, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luh et al., (2019) bahwa tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan penelitian lain oleh Abdullah & Hasbiullah (2023) menunjukkan bahwa pengaruh upah terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan positif, karena pertumbuhan modal manusia didorong oleh upah minimum, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

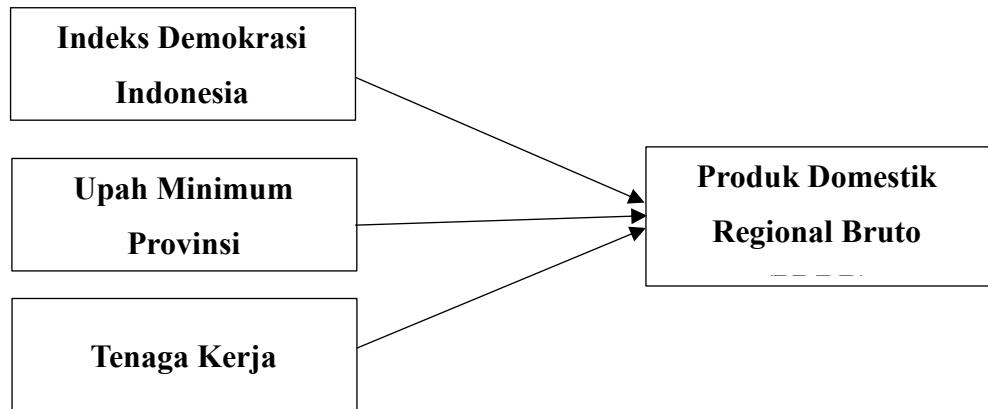
Studi oleh Prasetyo dan Kuncoro (2022) menemukan bahwa kenaikan UMP di beberapa provinsi di Jawa berdampak positif terhadap PDRB, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Namun, efeknya lebih kecil di sektor pertanian, yang masih memiliki dominasi tenaga kerja informal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Upah Minimum Provinsi berkontribusi terhadap PDRB di Pulau Jawa dalam periode 2015-2023.

2.2.3. Hubungan Tenaga Kerja terhadap PDRB

Adanya hubungan tenaga kerja dengan PDRB, hal ini juga didukung oleh pendapat Todaro (2000) yang menyatakan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi (Fu’ad, 2024). Tenaga kerja memiliki kontribusi yang cukup vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yang mana dengan adanya tenaga kerja maka produktivitas cenderung akan meningkat sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaputra et al., (2024) bahwa pengaruh Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap PDRB di 8 Kab/kota Provinsi Banten, hal ini dikarenakan berdasarkan Teori Pertumbuhan ekonomi Solow yang dikemukakan oleh ekonom Robert Solow. Berdasarkan teori ini, perkembangan ekonomi jangka panjang tergantung pada perkembangan faktor produksi, termasuk pekerja. Namun, dalam jangka panjang, tingkat perkembangan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal (modal per pekerja), kemajuan teknologi, dan efisiensi dalam alokasi sumber daya.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bahwa Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan tenaga kerja mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto. Oleh karena itu, dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian yang penulis lakukan dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada dasar pemikiran teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Pulau Jawa Tahun 2015-2023.
2. Diduga secara bersama-sama Indeks Demokrasi Indonesia, Upah Minimum Provinsi, dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB di Pulau Jawa Tahun 2015-2023.